



**KABUPATEN
LUWU UTARA**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2007
TANGGAL 12 JANUARI 2007
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 02
DISUSUN & DIPERBANYAK OLEH BAGIAN KEUANGAN SETDAKAB LUWU UTARA**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Luwu Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50/I/2007 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20054574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
Dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	392,637,816,000.00		
2. Belanja Daerah	Rp	<u>393,658,597,326.15</u>	-	
(Defisit).....			Rp	(1,020,781,326.15)
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan	Rp	10,153,781,326.15		
b. Pengeluaran	Rp	<u>9,133,000,000.00</u>	-	
Pembiayaan Netto			Rp	1,020,781,326.15
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp	(0.00)

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 13.500.000.000,00
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 354.086.590.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 25.051.226.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 2.551.460.000,00
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 7.518.414.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 250.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 3.180.126.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 29.439.590.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 268.664.000.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 55.983.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 1.286.502.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. 10.200.000.000,00
 - c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 9.164.724.000,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 4.400.000.000,00
 - e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. -

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 173.427.241.717,15
 - b. Belanja langsung sejumlah Rp. 220.231.355.609,00
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 148.865.366.200,00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. -
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. -
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 4.483.338.865,00
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 12.898.809.980,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 6.078.000.000,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.101.726.672,15

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 24.793.612.496,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 72.366.940.275,00
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 123.070.802.838,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sbagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 10153.781.326,15
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 9.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 1.957.218.326,15
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.-
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- g. Penerimaan Utang PFK Rp. 8.000.000.000,00
- h. Penerimaan Dana Bergulir Bagi Kelompok-Kelompok Usaha Unit Ekonomi bagi Perempuan Rp. 5.563.000,00
- i. Penerimaan Dana Bergulir Ketrampilan Tenaga Kerja Instiusional Rp. 75.000.000,00
- j. Penerimaan Dana Bergulir untuk Pengembangan Industri Kecil Rp. 115.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah sejumlah Rp. -
- c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. _
- d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
- e. Pembayaran Utang PFK sejumlah Rp. 8.000.000.000,00
- f. Dana Bergulir Modal Kerja sejumlah Rp. 133.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1; tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Organisasi
3. Lampiran III rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, dan Program
5. Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Pendapatan terhadap Belanja dan Pengeluaran
6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
8. Lampiran VII Daftar piutang daerah
9. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
10. Lampiran IX Daftar Pekiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
11. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya
12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahunan anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
13. Lampiran XII Daftar dan cadangan daerah, dan
14. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 12 Januari 2007

BUPATI LUWU UTARA


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 12 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA


Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR : 02



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ALAMAT : Jalan Simpursiang No. 26 ☎ (0473) 21130 Masamba

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf point a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lambaran negara Nomor 3851);
3. Undang- undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Perogram Pembangunan nasional (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran negara Nomor3952);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN Tahun 2003 Nomor 92);
6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Unadang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53);
8. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
9. Undang-Undang Republik Undonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembran negara Nomor 3848);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000, Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah Dan wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000, Nomor 210, Tambahan Lembaran negara nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Memperhatikan : Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Utara pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 8 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA ATAS PERSETUJUAN PENETAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 392.637.816.000,00	
2. Belanja.	Rp. 393.791.597.326,00	
(Defisit).....		(Rp. 1.153.781.326,15)
3. Pembiayaan.		
a. Penerimaan...	Rp. 10.153.781.326,15	
b. Pengeluaran...	Rp. 9.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto.....		Rp. 1.153.781.326,15
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan	Rp.	(0.00)

Pasal 2

- (1) Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- (2) Rekapitulasi Belanja Satuan Kerja sesuai hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Utara T. A. 2007 sebagaimana lampiran II Keputusan ini..

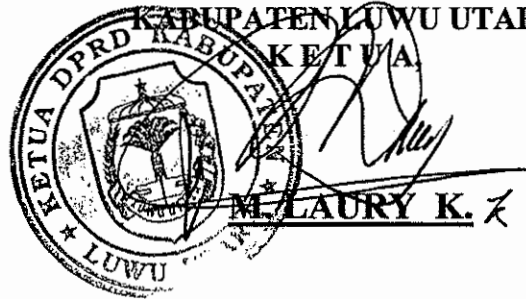
Pasal 3

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2007.

Setiap perlakuan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini agar tembusannya disampaikan pula kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal 12 Januari 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri RI. Di Jakarta
2. Gubernur Propensi Sul-Sel di Makassar.
3. Bupati Luwu Utara di Masamba.
4. Unsur Muspida Kab. Luwu Utara.

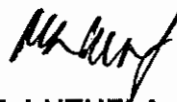
**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR 02 TAHUN 2007
TANGGAL 12 JANUARI 2007
TENTANG APBD KAB. LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	% ANGG.
1.	2.	3.	4.
1.	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 392.637.816.000,00	100,0%
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 13.500.000.000,00	3,4%
1. 1. 1.	Pajak Daerah	Rp. 2.551.460.000,00	0,6%
1. 1. 2.	Retribusi Daerah	Rp. 7.518.414.000,00	1,9%
1. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 250.000.000,00	0,1%
1. 1. 4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 3.180.126.000,00	0,8%
1. 2.	Dana Perimbangan	Rp. 354.086.590.000,00	90,2%
1. 2. 1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 29.439.590.000,00	7,5%
1. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	Rp. 268.664.000.000,00	68,4%
1. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	Rp. 55.983.000.000,00	14,3%
1. 3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 25.051.226.000,00	6,4%
1. 3. 1.	H i b a h	Rp. 1.286.502.000,00	0,3%
1. 3. 2.	Dana Darurat	Rp. 10.200.000.000,00	2,6%
1. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 9.164.724.000,00	2,3%
1. 3. 4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 4.400.000.000,00	1,1%
1. 3. 5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. -	0,0%
2.	BELANJA DAERAH	Rp. 393.658.597.326,15	100,0%
2. 1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 173.427.241.717,15	44,1%
2. 1. 1.	Belanja Pegawai	Rp. 148.865.366.200,00	37,8%
2. 1. 2.	Belanja Bunga	Rp. -	0,0%
2. 1. 3.	Belanja Subsidi	Rp. -	0,0%
2. 1. 4.	Belanja Hibah	Rp. -	0,0%
2. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.483.338.865,00	1,1%
2. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 12.898.809.980,00	3,3%
2. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 6.078.000.000,00	1,5%
2. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.101.726.672,15	0,3%
2. 2.	Belanja Langsung	Rp. 220.231.355.609,00	55,9%
2. 2. 1.	Belanja Pegawai	Rp. 24.793.612.496,00	6,3%
2. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 72.366.940.275,00	18,4%
2. 2. 3.	Belanja Modal	Rp. 123.070.802.838,00	31,3%
	Defisit	Rp. (1.020.781.326,15)	100,0%

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	% ANGG.
1.	2.	3.	4.
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp. 1.020.781.326,15	100,0%
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.153.781.326,15	100,0%
3. 1. 1.	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 1.957.218.326,15	19,3%
3. 1. 2.	Pencairan Dana Cadangan	Rp. -	0,0%
3. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. -	0,0%
3. 1. 4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. -	0,0%
3. 1. 5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp. -	0,0%
3. 1. 6.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp. -	0,0%
3. 1. 7.	Penerimaan Utang PFK	Rp. 8.000.000.000,00	78,8%
3. 1. 8.	Penerimaan Dana Bergulir Bagi Kelompok-Kelompok Usaha Unit Ekonomi Bagi Perempuan	Rp. 6.563.000,00	0,1%
3. 1. 9.	Penerimaan Dana Bergulir Keterampilan Tenaga Kerja Instiusional	Rp. 75.000.000,00	0,7%
3. 1. 10.	Penerimaan Dana Bergulir untuk Pengembangan Industri Kecil	Rp. 115.000.000,00	1,1%
3. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 9.133.000.000,00	100,0%
3. 2. 1.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -	0,0%
3. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp. 1.000.000.000,00	10,9%
3. 2. 3.	Pembayaran Pokok Utang	Rp. -	0,0%
3. 2. 4.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. -	0,0%
3. 2. 5.	Pembayaran Utang PFK	Rp. 8.000.000.000,00	87,6%
3. 2. 6.	Dana Bergulir bagi Kelompok-Kelompok Usaha Unit Ekonomi bagi Perempuan	Rp. -	0,0%
3. 2. 7.	Dana Bergulir Keterampilan Tenaga Instiusional	Rp. -	0,0%
3. 2. 8.	Piutang Pemda Luwu Utara	Rp. -	0,0%
3. 2. 9.	Dana Bergulir Modal Kerja	Rp. 133.000.000,00	1,5%
	SiLPA Anggaran Tahun Berkenan...	Rp. (0,00)	100,0%

BUPATI LUWU UTARA


H.M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
 NOMOR 02 TAHUN 2007
 TANGGAL 12 JANUARI 2007
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH MENURUT
 JENIS BELANJA ORGANISASI (SKPD)

NO.	KODE SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				BELANJA TIDAK LANGSUNG		
				BELANJA PEGAWAI		JUMLAH G = E + F
Belanja Gaji PNS E	Belanja Non Gaji PNS F					
A	B	C	D	E	F	G = E + F
I.	1.01.	PENDIDIKAN	Rp. -	Rp. 88.698.378.000	Rp. 5.090.100.000	Rp. 73.788.478.000
1.	1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata (Sudah termasuk Cabang Dinas Dikbudpar, SMPN, SMAN & SMKN)	Rp. -	Rp. 88.698.378.000	Rp. 5.090.100.000	Rp. 73.788.478.000
II.	1.02.	KESEHATAN	Rp. 4.836.850.000	Rp. 26.054.441.000	Rp. 3.420.300.000	Rp. 29.474.741.000
2.	1.02.01.	Dinas Kesehatan (Sudah termasuk Puskesmas)	Rp. 341.685.000	Rp. 23.330.428.000	Rp. 2.271.750.000	Rp. 25.602.178.000
3.	1.02.02.	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	Rp. 4.495.165.000	Rp. 2.724.013.000	Rp. 1.148.550.000	Rp. 3.872.563.000
III.	1.03.	PEKERJAAN UMUM	Rp. 574.895.000	Rp. 1.048.689.000	Rp. 247.350.000	Rp. 1.296.039.000
4.	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 574.895.000	Rp. 1.048.689.000	Rp. 247.350.000	Rp. 1.296.039.000
VI.	1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Rp. -	Rp. 512.942.000	Rp. 256.950.000	Rp. 769.892.000
5.	1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. -	Rp. 512.942.000	Rp. 256.950.000	Rp. 769.892.000
VII.	1.07.	PERHUBUNGAN	Rp. 380.000.000	Rp. 378.875.000	Rp. 126.750.000	Rp. 505.625.000
6.	1.07.01.	Dinas Perhubungan	Rp. 380.000.000	Rp. 378.875.000	Rp. 126.750.000	Rp. 505.625.000
X.	1.10.	KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Rp. 142.815.000	Rp. 1.682.531.000	Rp. 259.950.000	Rp. 1.942.481.000
7.	1.10.01.	Badan Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil & Keluarga Berencana	Rp. 142.815.000	Rp. 1.682.531.000	Rp. 259.950.000	Rp. 1.942.481.000
XIII.	1.13.	SOSIAL	Rp. 300.000	Rp. 494.002.000	Rp. 204.450.000	Rp. 698.452.000
8.	1.13.01.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp. 300.000	Rp. 494.002.000	Rp. 204.450.000	Rp. 698.452.000
XIV.	1.14.	TENAGA KERJA	Rp. 3.200.000	Rp. 854.380.000	Rp. 201.300.000	Rp. 1.055.680.000
9.	1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Rp. 3.200.000	Rp. 854.380.000	Rp. 201.300.000	Rp. 1.055.680.000
XV.	1.15.	KOPERASI & USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp. 126.000.000	Rp. 598.660.000	Rp. 217.350.000	Rp. 816.010.000
10.	1.15.01.	Dinas Koperasi & Penanaman Modal	Rp. 126.000.000	Rp. 598.660.000	Rp. 217.350.000	Rp. 816.010.000
XIX.	1.19.	KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	Rp. 1.500.000	Rp. 315.529.000	Rp. 84.900.000	Rp. 400.429.000
11.	1.19.01.	Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	Rp. 1.500.000	Rp. 315.529.000	Rp. 84.900.000	Rp. 400.429.000
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 385.957.640.000	Rp. 10.219.110.000	Rp. 13.097.466.200	Rp. 31.316.576.200
12.	1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	Rp. -	Rp. -	Rp. 8.284.453.200	Rp. 8.284.453.200
13.	1.20.02.	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	Rp. -	Rp. 161.806.000	Rp. 200.000.000	Rp. 361.806.000
14.	1.20.03.	Sekretariat Daerah	Rp. 342.745.058.000	Rp. 13.730.065.000	Rp. 1.720.050.500	Rp. 15.450.115.500
15.	1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)	Rp. -	Rp. 465.075.000	Rp. 125.612.500	Rp. 590.687.500
16.	1.20.05.	Badan Pengawasan Daerah	Rp. -	Rp. 680.625.000	Rp. 93.900.000	Rp. 774.525.000
17.	1.20.06.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 42.628.094.000	Rp. 764.120.000	Rp. 1.862.550.000	Rp. 2.626.670.000
18.	1.20.07.	Pemerintah Kecamatan Sabbang	Rp. 78.480.000	Rp. 208.420.000	Rp. 70.950.000	Rp. 279.370.000
19.	1.20.08.	Pemerintah Kecamatan Baebunta	Rp. 2.810.000	Rp. 131.447.000	Rp. 56.700.000	Rp. 188.147.000
20.	1.20.09.	Pemerintah Kecamatan Limbong	Rp. 350.000	Rp. 134.518.000	Rp. 54.150.000	Rp. 188.668.000
21.	1.20.10.	Pemerintah Kecamatan Seko	Rp. 350.000	Rp. 151.737.000	Rp. 53.550.000	Rp. 205.287.000
22.	1.20.11.	Pemerintah Kecamatan Rampi	Rp. 350.000	Rp. -	Rp. 84.300.000	Rp. 84.300.000
23.	1.20.12.	Pemerintah Kecamatan Malangke	Rp. 3.500.000	Rp. 125.615.000	Rp. 47.700.000	Rp. 173.315.000
24.	1.20.13.	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	Rp. 13.908.000	Rp. 139.700.000	Rp. 54.900.000	Rp. 194.600.000
25.	1.20.14.	Pemerintah Kecamatan Masamba	Rp. 269.100.000	Rp. 751.530.000	Rp. 79.950.000	Rp. 831.480.000
26.	1.20.15.	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	Rp. 13.620.000	Rp. 212.935.000	Rp. 60.750.000	Rp. 273.685.000
27.	1.20.16.	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	Rp. 144.800.000	Rp. 294.048.000	Rp. 75.750.000	Rp. 369.798.000
28.	1.20.17.	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	Rp. 47.220.000	Rp. 267.468.000	Rp. 62.100.000	Rp. 329.568.000
29.	1.20.18.	Pemerintah Kelurahan Kappuna	Rp. 2.000.000	Rp. -	Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000
30.	1.20.19.	Pemerintah Kelurahan Bone	Rp. 3.500.000	Rp. -	Rp. 29.550.000	Rp. 29.550.000
31.	1.20.20.	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	Rp. 2.000.000	Rp. -	Rp. 26.550.000	Rp. 26.550.000
32.	1.20.21.	Pemerintah Kelurahan Baliase	Rp. 2.500.000	Rp. -	Rp. 31.500.000	Rp. 31.500.000
XXI.	1.21.	KEPEGAWAIAN	Rp. 8.000.000	Rp. 508.069.000	Rp. 143.100.000	Rp. 651.169.000
33.	1.21.01.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 8.000.000	Rp. 508.069.000	Rp. 143.100.000	Rp. 651.169.000
XXII.	1.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	Rp. 25.000.000	Rp. 597.108.000	Rp. 168.600.000	Rp. 755.708.000
34.	1.22.01.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. -	Rp. 289.734.000	Rp. 59.700.000	Rp. 329.434.000
35.	1.22.02.	Badan Penelitian & Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	Rp. 25.000.000	Rp. 317.374.000	Rp. 108.900.000	Rp. 426.274.000
XV.	1.25.	KOMUNIKASI & INFORMASI	Rp. -	Rp. 173.632.000	Rp. 58.500.000	Rp. 232.132.000
36.	1.25.01.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	Rp. -	Rp. 173.632.000	Rp. 58.500.000	Rp. 232.132.000
XVI.	2.01.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	Rp. 136.051.000	Rp. 2.499.043.000	Rp. 207.600.000	Rp. 2.706.643.000
37.	2.01.01.	Dinas Pertanian dan Kelautan	Rp. 136.051.000	Rp. 2.499.043.000	Rp. 207.600.000	Rp. 2.706.643.000
XVII.	2.02.	KEHUTANAN	Rp. 434.650.000	Rp. 1.597.588.000	Rp. 247.350.000	Rp. 1.844.938.000
38.	2.02.01.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 434.650.000	Rp. 1.597.588.000	Rp. 247.350.000	Rp. 1.844.938.000
XVIII.	2.03.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	Rp. 10.915.000	Rp. 477.023.000	Rp. 133.350.000	Rp. 610.373.000
39.	2.03.01.	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	Rp. 10.915.000	Rp. 477.023.000	Rp. 133.350.000	Rp. 610.373.000
Jumlah I.....			Rp. 392.637.816.000	Rp. 124.700.000.000	Rp. 24.165.366.200	Rp. 148.865.366.200
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM				
1.	1.20.03.	Belanja Bunga (Sekretariat Daerah)				Rp. -
2.	1.20.03.	Belanja Subsidi (Sekretariat Daerah)				Rp. -
3.	1.20.03.	Belanja Hibah (Sekretariat Daerah)				Rp. -
4.	1.20.03.	Belanja Bantuan Sosial (Sekretariat Daerah)				Rp. 4.483.338.865,00
5.	1.20.03.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)				Rp. 12.898.809.980,00
6.	1.20.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)				Rp. 6.078.000.000,00
7.	1.20.03.	Belanja Tidak Terduga (Sekretariat Daerah)				Rp. 1.101.726.672,15
Jumlah II.....			Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 24.561.875.517,15
Total I....			Rp. 392.637.816.000,00	Rp. 124.700.000.000,00	Rp. 24.165.366.200,00	Rp. 173.427.241.717,15

Rp. 173.427.241.717,15
 Rp.

Selisih

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH MENURUT
JENIS BELANJA ORGANISASI (SKPD)

NO.	KODE SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH BELANJA			
			JUMLAH BELANJA LANGSUNG			
			JUMLAH BELANJA PEGAWAI T	JUMLAH BELANJA BARANG & JASA U	JUMLAH BELANJA MODAL V	JUMLAH W = T + U + V
A	B	C				
I.	1.01.	PENDIDIKAN				
1.	1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata (Sudah termasuk Cabang Dinas Dikbudpar, SMPN, SMAN & SMKN)	Rp. 5.518.216.180	Rp. 8.833.484.744	Rp. 27.260.910.000	Rp. 41.612.610.924
II.	1.02.	KESEHATAN				
2.	1.02.01.	Dinas Kesehatan (Sudah termasuk Puskesmas)	Rp. 1.178.519.100	Rp. 7.055.768.700	Rp. 13.641.908.000	Rp. 21.876.195.800
3.	1.02.02.	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	Rp. 697.000.000	Rp. 5.683.026.000	Rp. 2.852.174.000	Rp. 9.232.200.000
III.	1.03.	PEKERJAAN UMUM				
4.	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 1.580.915.500	Rp. 4.661.698.472	Rp. 65.056.512.758	Rp. 71.309.126.730
VI.	1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
5.	1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.695.112.250	Rp. 1.271.062.700	Rp. 815.615.000	Rp. 3.781.789.950
VII.	1.07.	PERHUBUNGAN				
6.	1.07.01.	Dinas Perhubungan	Rp. 612.398.316	Rp. 751.951.684	Rp. 3.977.250.000	Rp. 5.341.600.000
X.	1.10.	KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL				
7.	1.10.01.	Badan Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil & Keluarga Berencana	Rp. 1.405.152.950	Rp. 1.723.135.650	Rp. 80.533.780	Rp. 3.208.822.380
XIII.	1.13.	SOSIAL				
8.	1.13.01.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp. 309.821.400	Rp. 6.169.161.725	Rp. 127.790.000	Rp. 6.606.773.125
XIV.	1.14.	TENAGA KERJA				
9.	1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Rp. 281.365.000	Rp. 1.066.635.000	Rp. -	Rp. 1.328.000.000
XV.	1.15.	KOPERASI & USAHA KECIL DAN MENENGAH				
10.	1.15.01.	Dinas Koperasi & Penanaman Modal	Rp. 370.160.000	Rp. 879.907.000	Rp. 6.081.000	Rp. 1.256.148.000
XIX.	1.19.	KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI				
11.	1.19.01.	Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	Rp. 404.800.000	Rp. 780.807.000	Rp. 198.310.000	Rp. 1.383.917.000
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM				
12.	1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
13.	1.20.02.	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
14.	1.20.03.	Sekretariat Daerah	Rp. 4.033.280.000	Rp. 11.341.735.000	Rp. 800.701.100	Rp. 16.175.716.100
15.	1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)	Rp. 579.270.000	Rp. 3.233.630.000	Rp. 68.153.000	Rp. 3.881.053.000
16.	1.20.05.	Badan Pengawasan Daerah	Rp. 704.080.000	Rp. 787.052.500	Rp. -	Rp. 1.491.132.500
17.	1.20.06.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 673.885.000	Rp. 2.697.091.000	Rp. 289.500.000	Rp. 3.660.276.000
18.	1.20.07.	Pemerintah Kecamatan Sabbang	Rp. 31.680.000	Rp. 73.750.000	Rp. -	Rp. 105.430.000
19.	1.20.08.	Pemerintah Kecamatan Baebunta	Rp. 44.280.000	Rp. 66.400.000	Rp. -	Rp. 110.680.000
20.	1.20.09.	Pemerintah Kecamatan Limbong	Rp. 15.600.000	Rp. 92.820.000	Rp. -	Rp. 108.420.000
21.	1.20.10.	Pemerintah Kecamatan Seko	Rp. 24.810.000	Rp. 87.240.000	Rp. -	Rp. 122.050.000
22.	1.20.11.	Pemerintah Kecamatan Rampi	Rp. 20.400.000	Rp. 87.070.000	Rp. -	Rp. 107.470.000
23.	1.20.12.	Pemerintah Kecamatan Malangke	Rp. 52.800.000	Rp. 63.330.000	Rp. -	Rp. 116.130.000
24.	1.20.13.	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	Rp. 46.446.000	Rp. 69.680.700	Rp. 3.879.300	Rp. 120.000.000
25.	1.20.14.	Pemerintah Kecamatan Masamba	Rp. 45.420.000	Rp. 71.660.000	Rp. -	Rp. 117.080.000
26.	1.20.15.	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	Rp. 37.200.000	Rp. 75.000.000	Rp. -	Rp. 112.200.000
27.	1.20.16.	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	Rp. 44.700.000	Rp. 58.950.000	Rp. -	Rp. 103.650.000
28.	1.20.17.	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	Rp. 21.960.000	Rp. 89.790.000	Rp. -	Rp. 111.750.000
29.	1.20.18.	Pemerintah Kelurahan Kappuna	Rp. 46.860.000	Rp. 15.140.000	Rp. -	Rp. 62.000.000
30.	1.20.19.	Pemerintah Kelurahan Bone	Rp. 46.320.000	Rp. 15.680.000	Rp. -	Rp. 62.000.000
31.	1.20.20.	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	Rp. 47.160.000	Rp. 14.840.000	Rp. -	Rp. 62.000.000
32.	1.20.21.	Pemerintah Kelurahan Baliase	Rp. 52.356.000	Rp. 9.644.000	Rp. -	Rp. 62.000.000
XXI.	1.21.	KEPEGAWAIAN				
33.	1.21.01.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.322.490.000	Rp. 2.306.995.500	Rp. 182.564.500	Rp. 3.812.050.000
XXII.	1.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA				
34.	1.22.01.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 303.920.000	Rp. 3.287.168.000	Rp. 10.800.000	Rp. 3.601.888.000
35.	1.22.02.	Badan Penelitian & Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	Rp. 235.965.000	Rp. 710.204.000	Rp. 355.931.000	Rp. 1.302.100.000
XV.	1.25.	KOMUNIKASI & INFORMASI				
36.	1.25.01.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	Rp. 293.148.000	Rp. 434.767.000	Rp. 552.741.000	Rp. 1.280.656.000
XVI.	2.01.	PERTANIAN & PERKEBUNAN				
37.	2.01.01.	Dinas Pertanian dan Kelautan	Rp. 1.097.575.800	Rp. 5.026.106.700	Rp. 5.645.103.000	Rp. 11.768.785.500
XVII.	2.02.	KEHUTANAN				
38.	2.02.01.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 591.514.000	Rp. 1.685.640.600	Rp. 162.645.400	Rp. 2.439.800.000
XVIII.	2.03.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL				
39.	2.03.01.	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	Rp. 337.240.000	Rp. 1.078.916.600	Rp. 981.700.000	Rp. 2.397.856.600
Jumlah I....			Rp. 24.793.612.496	Rp. 72.366.940.275	Rp. 123.070.802.838	Rp. 220.231.355.609
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM				
1.	1.20.03.	Belanja Bunga (Sekretariat Daerah)				
2.	1.20.03.	Belanja Subsidi (Sekretariat Daerah)				
3.	1.20.03.	Belanja Hibah (Sekretariat Daerah)				
4.	1.20.03.	Belanja Bantuan Sosial (Sekretariat Daerah)				
5.	1.20.03.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)				
6.	1.20.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)				
7.	1.20.03.	Belanja Tidak Terduga (Sekretariat Daerah)				
Jumlah II....			Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Total ...			Rp. 24.793.612.496,00	Rp. 72.366.940.275,00	Rp. 123.070.802.838,00	Rp. 220.231.355.609,00
						Rp. 220.231.355.609
						Rp. -
						Rp. 16.175.716.100
						Rp. 16.175.716.100

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH MENURUT
JENIS BELANJA ORGANISASI (SKPD)

NO.	KODE SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA			
			BELANJA LANGSUNG			
			BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN			JUMLAH S = P+Q+R
BELANJA PEGAWAI P	BELANJA BARANG & JASA Q	BELANJA MODAL R				
A	B	C	P	Q	R	S = P+Q+R
I.	1.01.	PENDIDIKAN				
1.	1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata (Sudah termasuk Cabang Dinas Dikbudpar, SMPN, SMAN & SMKN)	Rp. 16.745.180	Rp. 69.254.820	Rp. 27.000.000	Rp. 113.000.000
II.	1.02.	KESEHATAN				
2.	1.02.01.	Dinas Kesehatan (Sudah termasuk Puskesmas)				Rp. -
3.	1.02.02.	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba				Rp. -
III.	1.03.	PEKERJAAN UMUM				
4.	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum				Rp. -
VI.	1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
5.	1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp. -
VII.	1.07.	PERHUBUNGAN				
6.	1.07.01.	Dinas Perhubungan				Rp. -
X.	1.10.	KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL				
7.	1.10.01.	Badan Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil & Keluarga Berencana				Rp. -
XIII.	1.13.	SOSIAL				
8.	1.13.01.	Dinas Kesejahteraan Sosial				Rp. -
XIV.	1.14.	TENAGA KERJA				
9.	1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Rp. 21.875.000	Rp. 412.125.000	Rp. -	Rp. 434.000.000
XV.	1.15.	KOPERASI & USAHA KECIL DAN MENENGAH				
10.	1.15.01.	Dinas Koperasi & Penanaman Modal	Rp. 93.075.000	Rp. 400.914.000	Rp. 631.000	Rp. 494.620.000
XIX.	1.19.	KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI				
11.	1.19.01.	Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat				Rp. -
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM				
12.	1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)				Rp. -
13.	1.20.02.	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah				Rp. -
14.	1.20.03.	Sekretariat Daerah	Rp. 1.950.000	Rp. 18.050.000	Rp. -	Rp. 20.000.000
15.	1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)				Rp. -
16.	1.20.05.	Badan Pengawasan Daerah				Rp. -
17.	1.20.06.	Dinas Pendapatan Daerah				Rp. -
18.	1.20.07.	Pemerintah Kecamatan Sabbang				Rp. -
19.	1.20.08.	Pemerintah Kecamatan Baebunta				Rp. -
20.	1.20.09.	Pemerintah Kecamatan Limbong				Rp. -
21.	1.20.10.	Pemerintah Kecamatan Seko				Rp. -
22.	1.20.11.	Pemerintah Kecamatan Rampi				Rp. -
23.	1.20.12.	Pemerintah Kecamatan Malangke				Rp. -
24.	1.20.13.	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat				Rp. -
25.	1.20.14.	Pemerintah Kecamatan Masamba				Rp. -
26.	1.20.15.	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng				Rp. -
27.	1.20.16.	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone				Rp. -
28.	1.20.17.	Pemerintah Kecamatan Sukamaju				Rp. -
29.	1.20.18.	Pemerintah Kelurahan Kappuna				Rp. -
30.	1.20.19.	Pemerintah Kelurahan Bone				Rp. -
31.	1.20.20.	Pemerintah Kelurahan Kasimbong				Rp. -
32.	1.20.21.	Pemerintah Kelurahan Baliase				Rp. -
XXI.	1.21.	KEPEGAWAIAN				
33.	1.21.01.	Badan Kepegawaian Daerah				Rp. -
XXII.	1.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA				
34.	1.22.01.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa				Rp. -
35.	1.22.02.	Badan Penelitian & Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan				Rp. -
XV.	1.25.	KOMUNIKASI & INFORMASI				
36.	1.25.01.	Kantor Pengolahan Data Elektronik				Rp. -
XVI.	2.01.	PERTANIAN & PERKEBUNAN				
37.	2.01.01.	Dinas Pertanian dan Kelautan	Rp. 381.030.800	Rp. 4.578.251.700	Rp. 5.635.103.000	Rp. 10.594.385.500
XVII.	2.02.	KEHUTANAN				
38.	2.02.01.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 221.100.000	Rp. 1.287.004.600	Rp. 134.895.400	Rp. 1.643.000.000
XVIII.	2.03.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL				
39.	2.03.01.	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	Rp. 162.850.000	Rp. 197.650.000	Rp. 44.500.000	Rp. 405.000.000
Jumlah I.....			Rp. 898.625.980	Rp. 6.963.250.120	Rp. 5.842.129.400	Rp. 13.704.005.500
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM				
1.	1.20.03.	Belanja Bunge (Sekretariat Daerah)				
2.	1.20.03.	Belanja Subsidi (Sekretariat Daerah)				
3.	1.20.03.	Belanja Hibah (Sekretariat Daerah)				
4.	1.20.03.	Belanja Bantuan Sosial (Sekretariat Daerah)				
5.	1.20.03.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)				
6.	1.20.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)				
7.	1.20.03.	Belanja Tidak Terduga (Sekretariat Daerah)				
Jumlah II.....						Rp. -
Total ...			Rp. 898.625.980,00	Rp. 6.963.250.120,00	Rp. 5.842.129.400,00	Rp. 13.704.005.500,00

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH MENURUT
JENIS BELANJA ORGANISASI (SKPD)

NO.	KODE SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA				
			BELANJA LANGSUNG				
			BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB				
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL	J U M L A H	
A	B	C	L	M	N	O = L + M + N	
I.	1.01.	PENDIDIKAN					
1.	1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata (Sudah termasuk Cabang Dinas Dikbudpar, SMPN, SMAN & SMKN)	Rp. 3.546.271.000	Rp. 8.360.929.924	Rp. 27.233.910.000	Rp. 39.141.110.924	
II.	1.02.	KESEHATAN					
2.	1.02.01.	Dinas Kesehatan (Sudah termasuk Puskesmas)	Rp. 878.219.100	Rp. 6.585.667.800	Rp. 13.611.450.000	Rp. 21.075.336.900	
3.	1.02.02.	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	Rp. 73.250.000	Rp. 3.927.715.000	Rp. 1.569.035.000	Rp. 5.570.000.000	
III.	1.03.	PEKERJAAN UMUM					
4.	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 1.091.818.000	Rp. 3.876.524.668	Rp. 58.016.038.258	Rp. 62.984.380.926	
VI.	1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
5.	1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.379.012.250	Rp. 755.062.700	Rp. 459.415.000	Rp. 2.593.489.950	
VII.	1.07.	PERHUBUNGAN					
6.	1.07.01.	Dinas Perhubungan	Rp. 283.898.316	Rp. 482.751.684	Rp. 3.977.250.000	Rp. 4.743.900.000	
X.	1.10.	KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL					
7.	1.10.01.	Badan Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil & Keluarga Berencana	Rp. 1.163.131.950	Rp. 1.428.727.150	Rp. 34.763.280	Rp. 2.626.622.380	
XIII.	1.13.	SOSIAL					
8.	1.13.01.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp. 198.601.400	Rp. 5.878.981.725	Rp. 127.790.000	Rp. 6.205.373.125	
XIV.	1.14.	TENAGA KERJA					
9.	1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Rp. 51.750.000	Rp. 327.750.000	Rp. -	Rp. 379.500.000	
XV.	1.15.	KOPERASI & USAHA KECIL DAN MENENGAH					
10.	1.15.01.	Dinas Koperasi & Penanaman Modal	Rp. 32.625.000	Rp. 166.153.000	Rp. 450.000	Rp. 199.228.000	
XX.	1.19.	KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI					
11.	1.19.01.	Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	Rp. 120.800.000	Rp. 514.200.000	Rp. -	Rp. 635.000.000	
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM					
12.	1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)				Rp. -	
13.	1.20.02.	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah				Rp. -	
14.	1.20.03.	Sekretariat Daerah	Rp. 2.309.885.000	Rp. 5.248.550.000	Rp. 205.215.000	Rp. 7.763.650.000	
15.	1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)	Rp. 294.360.000	Rp. 2.291.640.000	Rp. -	Rp. 2.586.000.000	
16.	1.20.05.	Badan Pengawasan Daerah	Rp. 562.580.000	Rp. 507.890.000	Rp. -	Rp. 1.070.470.000	
17.	1.20.06.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 402.960.000	Rp. 2.192.037.000	Rp. 289.500.000	Rp. 2.884.497.000	
18.	1.20.07.	Pemerintah Kecamatan Sabbang	Rp. -	Rp. 15.430.000	Rp. -	Rp. 15.430.000	
19.	1.20.08.	Pemerintah Kecamatan Baebunta	Rp. -	Rp. 21.522.000	Rp. -	Rp. 21.522.000	
20.	1.20.09.	Pemerintah Kecamatan Limbong	Rp. -	Rp. 19.355.000	Rp. -	Rp. 19.355.000	
21.	1.20.10.	Pemerintah Kecamatan Seko	Rp. -	Rp. 16.087.200	Rp. -	Rp. 16.087.200	
22.	1.20.11.	Pemerintah Kecamatan Rampi	Rp. -	Rp. 17.865.000	Rp. -	Rp. 17.865.000	
23.	1.20.12.	Pemerintah Kecamatan Malangke	Rp. 11.400.000	Rp. 17.711.000	Rp. -	Rp. 29.111.000	
24.	1.20.13.	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	Rp. -	Rp. 22.251.200	Rp. -	Rp. 22.251.200	
25.	1.20.14.	Pemerintah Kecamatan Masamba	Rp. 1.800.000	Rp. 10.503.000	Rp. -	Rp. 12.303.000	
26.	1.20.15.	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	Rp. -	Rp. 15.754.000	Rp. -	Rp. 15.754.000	
27.	1.20.16.	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	Rp. -	Rp. 10.971.000	Rp. -	Rp. 10.971.000	
28.	1.20.17.	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	Rp. -	Rp. 26.388.500	Rp. -	Rp. 26.388.500	
29.	1.20.18.	Pemerintah Kelurahan Kappuna	Rp. 6.000.000	Rp. 1.720.000	Rp. -	Rp. 7.720.000	
30.	1.20.19.	Pemerintah Kelurahan Bone	Rp. 8.760.000	Rp. 4.545.500	Rp. -	Rp. 13.305.500	
31.	1.20.20.	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	Rp. 1.080.000	Rp. 3.365.000	Rp. -	Rp. 4.445.000	
32.	1.20.21.	Pemerintah Kelurahan Baliase	Rp. 6.000.000	Rp. 1.187.000	Rp. -	Rp. 7.187.000	
XX.	1.21.	KEPEGAWAIAN					
33.	1.21.01.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 1.252.655.000	Rp. 2.003.030.500	Rp. 173.764.500	Rp. 3.429.450.000	
XXI.	1.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA					
34.	1.22.01.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 165.270.000	Rp. 3.039.518.000	Rp. -	Rp. 3.204.788.000	
35.	1.22.02.	Badan Penelitian & Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	Rp. 59.765.000	Rp. 274.304.000	Rp. 280.931.000	Rp. 615.000.000	
XV.	1.25.	KOMUNIKASI & INFORMASI					
36.	1.25.01.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	Rp. 202.148.000	Rp. 276.127.000	Rp. 552.741.000	Rp. 1.031.014.000	
XVI.	2.01.	PERTANIAN & PERKEBUNAN					
37.	2.01.01.	Dinas Pertanian dan Kelautan				Rp. -	
XVII.	2.02.	KEHUTANAN					
38.	2.02.01.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan				Rp. -	
XVIII.	2.03.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL					
39.	2.03.01.	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	Rp. 50.750.000	Rp. 557.106.600	Rp. 937.200.000	Rp. 1.545.056.600	
Jumlah I....			Rp. 14.154.788.016	Rp. 48.899.322.151	Rp. 107.469.453.038	Rp. 170.523.563.205	
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM					
1.	1.20.03.	Belanja Bunga (Sekretariat Daerah)					
2.	1.20.03.	Belanja Subsidi (Sekretariat Daerah)					
3.	1.20.03.	Belanja Hibah (Sekretariat Daerah)					
4.	1.20.03.	Belanja Bantuan Sosial (Sekretariat Daerah)					
5.	1.20.03.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)					
6.	1.20.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)					
7.	1.20.03.	Belanja Tidak Terduga (Sekretariat Daerah)					
Jumlah II....			Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
T o t a l ...			Rp. 14.154.788.016,00	Rp. 48.899.322.151,00	Rp. 107.469.453.038,00	Rp. 170.523.563.205,00	

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH MENURUT
JENIS BELANJA ORGANISASI (SKPD)

NO.	KODE SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	B E L A N J A			
			BELANJA LANGSUNG			
			BELANJA LANGSUNG (UMUM)			
A	B	C	H	I	J	K = H+I+J
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG & JASA	BELANJA MODAL	J U M L A H
I.	1.01.	PENDIDIKAN	Rp. 1.955.200.000	Rp. 403.300.000	Rp. -	Rp. 2.358.500.000
1.	1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata (Sudah termasuk Cabang Dinas Dikbudpar, SMPN, SMAN & SMKN)	Rp. 1.955.200.000	Rp. 403.300.000	Rp. -	Rp. 2.358.500.000
II.	1.02.	KESEHATAN	Rp. 924.050.000	Rp. 2.225.411.900	Rp. 1.313.597.000	Rp. 4.463.058.900
2.	1.02.01.	Dinas Kesehatan (Sudah termasuk Puskesmas)	Rp. 300.300.000	Rp. 470.100.900	Rp. 30.458.000	Rp. 800.858.900
3.	1.02.02.	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	Rp. 623.750.000	Rp. 1.755.311.000	Rp. 1.283.139.000	Rp. 3.662.200.000
III.	1.03.	PEKERJAAN UMUM	Rp. 499.097.500	Rp. 785.173.804	Rp. 7.040.474.500	Rp. 8.324.745.804
4.	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 499.097.500	Rp. 785.173.804	Rp. 7.040.474.500	Rp. 8.324.745.804
VI.	1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Rp. 316.100.000	Rp. 516.000.000	Rp. 356.200.000	Rp. 1.188.300.000
5.	1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 316.100.000	Rp. 516.000.000	Rp. 356.200.000	Rp. 1.188.300.000
VII.	1.07.	PERHUBUNGAN	Rp. 328.500.000	Rp. 269.200.000	Rp. -	Rp. 597.700.000
6.	1.07.01.	Dinas Perhubungan	Rp. 328.500.000	Rp. 269.200.000	Rp. -	Rp. 597.700.000
X.	1.10.	KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Rp. 242.021.000	Rp. 294.408.500	Rp. 45.770.500	Rp. 582.200.000
7.	1.10.01.	Badan Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil & Keluarga Berencana	Rp. 242.021.000	Rp. 294.408.500	Rp. 45.770.500	Rp. 582.200.000
XIII.	1.13.	SOSIAL	Rp. 111.220.000	Rp. 290.180.000	Rp. -	Rp. 401.400.000
8.	1.13.01.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp. 111.220.000	Rp. 290.180.000	Rp. -	Rp. 401.400.000
XIV.	1.14.	TENAGA KERJA	Rp. 187.740.000	Rp. 326.760.000	Rp. -	Rp. 514.500.000
9.	1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Rp. 187.740.000	Rp. 326.760.000	Rp. -	Rp. 514.500.000
XV.	1.15.	KOPERASI & USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp. 244.460.000	Rp. 312.840.000	Rp. 5.000.000	Rp. 562.300.000
10.	1.15.01.	Dinas Koperindag & Penanaman Modal	Rp. 244.460.000	Rp. 312.840.000	Rp. 5.000.000	Rp. 562.300.000
XIX.	1.19.	KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	Rp. 284.000.000	Rp. 266.607.000	Rp. 198.310.000	Rp. 748.917.000
11.	1.19.01.	Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	Rp. 284.000.000	Rp. 266.607.000	Rp. 198.310.000	Rp. 748.917.000
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 2.961.526.000	Rp. 8.497.680.800	Rp. 667.518.400	Rp. 12.126.725.200
12.	1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)				Rp. -
13.	1.20.02.	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah				Rp. -
14.	1.20.03.	Sekretariat Daerah	Rp. 1.721.445.000	Rp. 6.075.135.000	Rp. 595.486.100	Rp. 8.392.066.100
15.	1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)	Rp. 284.910.000	Rp. 941.990.000	Rp. 68.153.000	Rp. 1.295.053.000
16.	1.20.05.	Badan Pengawasan Daerah	Rp. 141.500.000	Rp. 279.162.500	Rp. -	Rp. 420.662.500
17.	1.20.06.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 270.725.000	Rp. 505.054.000	Rp. -	Rp. 775.779.000
18.	1.20.07.	Pemerintah Kecamatan Sabbang	Rp. 31.680.000	Rp. 58.320.000	Rp. -	Rp. 90.000.000
19.	1.20.08.	Pemerintah Kecamatan Baebunta	Rp. 44.280.000	Rp. 44.878.000	Rp. -	Rp. 89.158.000
20.	1.20.09.	Pemerintah Kecamatan Limbong	Rp. 15.600.000	Rp. 73.465.000	Rp. -	Rp. 89.065.000
21.	1.20.10.	Pemerintah Kecamatan Seko	Rp. 24.810.000	Rp. 81.152.800	Rp. -	Rp. 105.962.800
22.	1.20.11.	Pemerintah Kecamatan Rampi	Rp. 20.400.000	Rp. 69.205.000	Rp. -	Rp. 89.605.000
23.	1.20.12.	Pemerintah Kecamatan Malangke	Rp. 41.400.000	Rp. 45.619.000	Rp. -	Rp. 87.019.000
24.	1.20.13.	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	Rp. 46.440.000	Rp. 47.429.500	Rp. 3.879.300	Rp. 97.748.800
25.	1.20.14.	Pemerintah Kecamatan Masamba	Rp. 43.620.000	Rp. 81.157.000	Rp. -	Rp. 124.777.000
26.	1.20.15.	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	Rp. 37.200.000	Rp. 59.246.000	Rp. -	Rp. 96.446.000
27.	1.20.16.	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	Rp. 44.700.000	Rp. 47.979.000	Rp. -	Rp. 92.679.000
28.	1.20.17.	Pemerintah Kecamatan Sukameju	Rp. 21.960.000	Rp. 63.401.500	Rp. -	Rp. 85.361.500
29.	1.20.18.	Pemerintah Kelurahan Kappuna	Rp. 40.860.000	Rp. 13.420.000	Rp. -	Rp. 54.280.000
30.	1.20.19.	Pemerintah Kelurahan Bone	Rp. 37.560.000	Rp. 11.134.500	Rp. -	Rp. 48.694.500
31.	1.20.20.	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	Rp. 46.080.000	Rp. 11.475.000	Rp. -	Rp. 57.555.000
32.	1.20.21.	Pemerintah Kelurahan Baliase	Rp. 46.356.000	Rp. 8.457.000	Rp. -	Rp. 54.813.000
XXI.	1.21.	KEPEGAWAIAN	Rp. 69.835.000	Rp. 303.985.000	Rp. 8.800.000	Rp. 382.600.000
33.	1.21.01.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 69.835.000	Rp. 303.985.000	Rp. 8.800.000	Rp. 382.600.000
XXII.	1.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	Rp. 314.850.000	Rp. 683.550.000	Rp. 85.800.000	Rp. 1.084.200.000
34.	1.22.01.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 138.650.000	Rp. 247.650.000	Rp. 10.800.000	Rp. 397.100.000
35.	1.22.02.	Badan Penelitian & Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	Rp. 176.200.000	Rp. 435.900.000	Rp. 75.000.000	Rp. 687.100.000
XV.	1.25.	KOMUNIKASI & INFORMASI	Rp. 91.000.000	Rp. 158.640.000	Rp. -	Rp. 249.640.000
36.	1.25.01.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	Rp. 91.000.000	Rp. 158.640.000	Rp. -	Rp. 249.640.000
XVI.	2.01.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	Rp. 716.545.000	Rp. 447.855.000	Rp. 10.000.000	Rp. 1.174.400.000
37.	2.01.01.	Dinas Pertanian dan Kelautan	Rp. 716.545.000	Rp. 447.855.000	Rp. 10.000.000	Rp. 1.174.400.000
XVII.	2.02.	KEHUTANAN	Rp. 370.414.000	Rp. 398.636.000	Rp. 27.750.000	Rp. 796.800.000
38.	2.02.01.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 370.414.000	Rp. 398.636.000	Rp. 27.750.000	Rp. 796.800.000
XVIII.	2.03.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	Rp. 123.640.000	Rp. 324.160.000	Rp. -	Rp. 447.800.000
39.	2.03.01.	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	Rp. 123.640.000	Rp. 324.160.000	Rp. -	Rp. 447.800.000
Jumlah I....			Rp. 9.740.198.500	Rp. 16.504.368.004	Rp. 9.759.220.400	Rp. 36.003.786.904
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM				
1.	1.20.03.	Belanja Bunga (Sekretariat Daerah)				
2.	1.20.03.	Belanja Subsidi (Sekretariat Daerah)				
3.	1.20.03.	Belanja Hibah (Sekretariat Daerah)				
4.	1.20.03.	Belanja Bantuan Sosial (Sekretariat Daerah)				
5.	1.20.03.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)				
6.	1.20.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)				
7.	1.20.03.	Belanja Tidak Terduga (Sekretariat Daerah)				
Jumlah II....			Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Total ...			Rp. 9.740.198.500,00	Rp. 16.504.368.004,00	Rp. 9.759.220.400,00	Rp. 36.003.786.904,00

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH MENURUT
JENIS BELANJA ORGANISASI (SKPD)

NO.	KODE SKPD	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TOTAL BELANJA	SURPLUS / DEFISIT	BELANJA GAJI PNS T.A.2007	BEL. NON GAJI PNS T.A.2007	TOTAL BELANJA
A	B	C	X = G + W	Y = D - X	Z = E	AA = F + W	AB = Z + AA
I.	1.01.	PENDIDIKAN					
1.	1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan & Pariwisata (Sudah termasuk Cabang Dinas Dikbudpar, SMPN, SMAN & SMKN)	Rp. 115.401.088.924	Rp. (115.401.088.924)	Rp. 68.698.378.000	Rp. 46.702.710.924	Rp. 115.401.088.924
II.	1.02.	KESEHATAN					
2.	1.02.01.	Dinas Kesehatan (Sudah termasuk Puskesmas)	Rp. 47.478.373.800	Rp. (47.136.688.800)	Rp. 23.330.428.000	Rp. 24.147.945.800	Rp. 47.478.373.800
3.	1.02.02.	Kantor Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba	Rp. 13.104.763.000	Rp. (8.609.598.000)	Rp. 2.724.013.000	Rp. 10.380.750.000	Rp. 13.104.763.000
III.	1.03.	PEKERJAAN UMUM					
4.	1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp. 72.605.165.730	Rp. (72.030.270.730)	Rp. 1.048.689.000	Rp. 71.556.476.730	Rp. 72.605.165.730
VI.	1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
5.	1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.551.681.950	Rp. (4.551.681.950)	Rp. 512.942.000	Rp. 4.038.739.950	Rp. 4.551.681.950
VII.	1.07.	PERHUBUNGAN					
6.	1.07.01.	Dinas Perhubungan	Rp. 5.847.225.000	Rp. (5.467.225.000)	Rp. 378.875.000	Rp. 5.468.350.000	Rp. 5.847.225.000
X.	1.10.	KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL					
7.	1.10.01.	Badan Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil & Keluarga Berencana	Rp. 5.151.303.380	Rp. (5.008.488.380)	Rp. 1.682.531.000	Rp. 3.468.772.380	Rp. 5.151.303.380
XIII.	1.13.	SOSIAL					
8.	1.13.01.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Rp. 7.305.225.125	Rp. (7.304.925.125)	Rp. 494.002.000	Rp. 6.811.223.125	Rp. 7.305.225.125
XIV.	1.14.	TENAGA KERJA					
9.	1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Rp. 2.383.680.000	Rp. (2.380.480.000)	Rp. 854.380.000	Rp. 1.529.300.000	Rp. 2.383.680.000
XV.	1.15.	KOPERASI & USAHA KECIL DAN MENENGAH					
10.	1.15.01.	Dinas Koperindag & Penanaman Modal	Rp. 2.072.158.000	Rp. (1.945.158.000)	Rp. 598.660.000	Rp. 1.473.498.000	Rp. 2.072.158.000
XIX.	1.19.	KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI					
11.	1.19.01.	Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	Rp. 1.784.346.000	Rp. (1.782.846.000)	Rp. 315.529.000	Rp. 1.468.817.000	Rp. 1.784.346.000
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM					
12.	1.20.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pos DPRD)	Rp. 8.284.453.200	Rp. (8.284.453.200)	Rp. -	Rp. 8.284.453.200	Rp. 8.284.453.200
13.	1.20.02.	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	Rp. 361.806.000	Rp. (361.806.000)	Rp. 161.806.000	Rp. 200.000.000	Rp. 361.806.000
14.	1.20.03.	Sekretariat Daerah	Rp. 31.625.831.600	Rp. 311.119.226.400	Rp. 13.730.085.000	Rp. 17.895.766.600	Rp. 31.625.831.600
15.	1.20.04.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD)	Rp. 4.471.740.500	Rp. (4.471.740.500)	Rp. 465.075.000	Rp. 4.006.665.500	Rp. 4.471.740.500
16.	1.20.05.	Badan Pengawasan Daerah	Rp. 2.265.658.500	Rp. (2.265.658.500)	Rp. 680.626.000	Rp. 1.585.032.500	Rp. 2.265.658.500
17.	1.20.06.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 6.286.946.000	Rp. 36.341.148.000	Rp. 764.120.000	Rp. 5.522.826.000	Rp. 6.286.946.000
18.	1.20.07.	Pemerintah Kecamatan Sabbang	Rp. 384.800.000	Rp. (306.320.000)	Rp. 208.420.000	Rp. 176.380.000	Rp. 384.800.000
19.	1.20.08.	Pemerintah Kecamatan Baebunta	Rp. 298.827.000	Rp. (296.017.000)	Rp. 131.447.000	Rp. 167.380.000	Rp. 298.827.000
20.	1.20.09.	Pemerintah Kecamatan Limbong	Rp. 297.088.000	Rp. (296.738.000)	Rp. 134.518.000	Rp. 162.570.000	Rp. 297.088.000
21.	1.20.10.	Pemerintah Kecamatan Soko	Rp. 327.337.000	Rp. (326.987.000)	Rp. 151.737.000	Rp. 175.600.000	Rp. 327.337.000
22.	1.20.11.	Pemerintah Kecamatan Rangi	Rp. 191.770.000	Rp. (191.420.000)	Rp. -	Rp. 191.770.000	Rp. 191.770.000
23.	1.20.12.	Pemerintah Kecamatan Malangke	Rp. 289.445.000	Rp. (285.945.000)	Rp. 125.615.000	Rp. 163.830.000	Rp. 289.445.000
24.	1.20.13.	Pemerintah Kecamatan Malangke Barat	Rp. 314.600.000	Rp. (300.692.000)	Rp. 139.700.000	Rp. 174.900.000	Rp. 314.600.000
25.	1.20.14.	Pemerintah Kecamatan Masamba	Rp. 948.560.000	Rp. (679.460.000)	Rp. 751.530.000	Rp. 197.030.000	Rp. 948.560.000
26.	1.20.15.	Pemerintah Kecamatan Mappedeceng	Rp. 385.885.000	Rp. (372.265.000)	Rp. 212.935.000	Rp. 172.950.000	Rp. 385.885.000
27.	1.20.16.	Pemerintah Kecamatan Bone-Bone	Rp. 473.448.000	Rp. (328.648.000)	Rp. 294.048.000	Rp. 179.400.000	Rp. 473.448.000
28.	1.20.17.	Pemerintah Kecamatan Sukamaju	Rp. 441.318.000	Rp. (384.098.000)	Rp. 267.468.000	Rp. 173.850.000	Rp. 441.318.000
29.	1.20.18.	Pemerintah Kelurahan Kappuna	Rp. 84.500.000	Rp. (82.500.000)	Rp. -	Rp. 84.500.000	Rp. 84.500.000
30.	1.20.19.	Pemerintah Kelurahan Bone	Rp. 91.550.000	Rp. (88.050.000)	Rp. -	Rp. 91.550.000	Rp. 91.550.000
31.	1.20.20.	Pemerintah Kelurahan Kasimbong	Rp. 88.550.000	Rp. (86.550.000)	Rp. -	Rp. 88.550.000	Rp. 88.550.000
32.	1.20.21.	Pemerintah Kelurahan Baliase	Rp. 93.500.000	Rp. (81.000.000)	Rp. -	Rp. 93.500.000	Rp. 93.500.000
XXI.	1.21.	KEPEGAWAIAN					
33.	1.21.01.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 4.463.219.000	Rp. (4.455.219.000)	Rp. 508.069.000	Rp. 3.955.150.000	Rp. 4.463.219.000
XXII.	1.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA					
34.	1.22.01.	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 3.931.322.000	Rp. (3.931.322.000)	Rp. 269.734.000	Rp. 3.661.588.000	Rp. 3.931.322.000
35.	1.22.02.	Badan Penelitian & Penerapan Teknologi Ekonomi Kerakyatan	Rp. 1.728.374.000	Rp. (1.703.374.000)	Rp. 317.374.000	Rp. 1.411.000.000	Rp. 1.728.374.000
XV.	1.25.	KOMUNIKASI & INFORMASI					
36.	1.25.01.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	Rp. 1.512.786.000	Rp. (1.512.786.000)	Rp. 173.632.000	Rp. 1.339.154.000	Rp. 1.512.786.000
XVI.	2.01.	PERTANIAN & PERKEBUNAN					
37.	2.01.01.	Dinas Pertanian dan Kelautan	Rp. 14.475.428.500	Rp. (14.339.377.500)	Rp. 2.499.043.000	Rp. 11.976.385.500	Rp. 14.475.428.500
XVII.	2.02.	KEHUTANAN					
38.	2.02.01.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp. 4.284.738.000	Rp. (3.850.088.000)	Rp. 1.597.588.000	Rp. 2.687.150.000	Rp. 4.284.738.000
XVIII.	2.03.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL					
39.	2.03.01.	Dinas Pertambangan, Energi & Lingkungan Hidup	Rp. 3.008.229.600	Rp. (2.997.314.600)	Rp. 477.023.000	Rp. 2.531.206.600	Rp. 3.008.229.600
Jumlah I....			Rp. 369.096.721.809	Rp. 23.541.094.191	Rp. 124.700.000.000	Rp. 244.396.721.809	Rp. 369.096.721.809
XX.	1.20.	PEMERINTAHAN UMUM					
1.	1.20.03.	Belanja Bunga (Sekretariat Daerah)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
2.	1.20.03.	Belanja Subsidi (Sekretariat Daerah)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
3.	1.20.03.	Belanja Hibah (Sekretariat Daerah)	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -
4.	1.20.03.	Belanja Bantuan Sosial (Sekretariat Daerah)	Rp. 4.483.338.865,00	Rp. 4.483.338.865,00	Rp. -	Rp. 4.483.338.865,00	Rp. 4.483.338.865,00
5.	1.20.03.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)	Rp. 12.898.809.980,00	Rp. 12.898.809.980,00	Rp. -	Rp. 12.898.809.980,00	Rp. 12.898.809.980,00
6.	1.20.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (Sekretariat Daerah)	Rp. 6.078.000.000,00	Rp. 6.078.000.000,00	Rp. -	Rp. 6.078.000.000,00	Rp. 6.078.000.000,00
7.	1.20.03.	Belanja Tidak Terduga (Sekretariat Daerah)	Rp. 1.101.726.672,15	Rp. 1.101.726.672,15	Rp. -	Rp. 1.101.726.672,15	Rp. 1.101.726.672,15
Jumlah II....			Rp. 24.581.875.517,15	Rp. 24.581.875.517,15	Rp. -	Rp. 24.581.875.517,15	Rp. 24.581.875.517,15
Total ...			Rp. 393.658.597.326,15	Rp. 48.102.969.708,15	Rp. 124.700.000.000,00	Rp. 268.958.597.326,15	Rp. 393.658.597.326,15

BUPATI LUWU UTARA


H.M. LUTHFI A. MUTY